



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN ANGGARAN 2020**

**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp/Fax. (0536) 3221716 email : biroorganisasi@kalteng.go.id
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia dan hidayah-Nya. Sehingga sepanjang tahun 2020, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Tahun 2020 juga dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

LKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas atas pencapaian kinerja disesuaikan dengan visi, misi dan tugas fungsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja agar tugas fungsi dapat dilakukan dengan baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP Tahun 2020 masih belum sempurna, baik dilihat dari penentuan indikator kinerja, penilaian pencapaian indikator kinerja dan keterbatasan lainnya. Harapan kami pada Tahun 2021 dapat membawa pembaharuan lebih dalam mengenai peningkatan kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng.

Demikian penyusunan LKIP disusun, kami mengharapkan masukan, saran ataupun kritik yang dapat membangun peningkatan kinerja agar bisa lebih baik lagi di masa akan datang.

Palangka Raya, Februari 2020

Plt. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr. LIES FAHIMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196312071991022001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Biro Organisasi mempunyai tugas dan fungsi pokok yaitu menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana.

Ringkasan capaian kinerja Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2020 menunjukkan keberhasilan yang baik. Artinya telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya secara maksimal walaupun dengan kondisi anggaran yang terbatas.
2. Pencapaian 6 (enam) sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian kinerja yang baik.
3. Informasi mengenai kinerja Biro Organisasi yang disajikan dapat dijadikan bahan untuk perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka penguatan akuntabilitas dan manajemen kinerja.
4. Masing-masing Bagian di lingkungan Biro Organisasi telah mengevaluasi indikator kinerja sasaran strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi guna penyempurnaan akan datang.

Adapun melalui penyusunan LKIP dapat diketahui perkembangan dan pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), khususnya dalam menciptakan transparansi yang merupakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Biro Organisasi.....	2
C. Sumber Daya Perangkat Daerah	3
1. Sumber Daya Manusia.....	3
2. Sarana dan Prasarana	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis.....	6
1. Visi.....	6
2. Misi	6
3. Tujuan	7
4. Sasaran	9
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
B. Analisis Capaian Kinerja.....	17
SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Nilai (Kategori) Penyusunan Laporan Kinerja LAPKIN yang baik dan benar	19



SASARAN STRATEGIS 2 Tersusunnya Perda dan Pergub UPTD Provinsi, Kabupaten/Kota.....	25
SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Akurasi dan Kualitas Analisis Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.....	30
SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Transparansi kepemilikan Harta Kekayaan ASN (Pejabat) Pemerintah Provinsi Kalteng	33
SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan Tumbuhnya Inovasi Pelayanan	37
SASARAN STRATEGIS 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	42
C. Analisis Efisiensi.....	48
D. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	49
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Sarana dan Prasarana Penunjang	5
Tabel 2. 1	Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020	11
Tabel 3. 1	Skala Nilai Pencapaian Kinerja	13
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja Biro Organisasi Setda Prov Kalteng Tahun 2020.....	13
Tabel 3. 3	Realisasi Kinerja Biro Organisasi Berdasarkan RPJMD 2016-2021.....	17
Tabel 3. 4	Hasil Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.....	19
Tabel 3. 5	Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah	20
Tabel 3. 6	Hasil Evaluasi LKIP PD Provinsi Kalimantan Tengah	23
Tabel 3. 7	Pergub UPTD Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	26
Tabel 3. 8	Rincian Jabatan di Provinsi Kalteng Tahun 2020.....	30
Tabel 3. 9	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	31
Tabel 3. 10	Rekapitulasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020..	32
Tabel 3. 11	Jumlah Jabatan yang Menempati Jabatan.....	32
Tabel 3. 12	Rekapitulasi Jabatan Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	32
Tabel 3. 13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	36
Tabel 3. 14	Inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	38
Tabel 3. 15	Jumlah Inovasi di Provinsi Kalimantan Tengah.....	39
Tabel 3. 16	Jumlah Dokumen SOP	40
Tabel 3. 17	Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.....	40
Tabel 3. 18	Daftar Nilai IKM PD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	41
Tabel 3. 19	Perbandingan Nilai IKM Tahun.....	41
Tabel 3. 20	Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi	43
Tabel 3. 21	Analisis Efisiensi	48
Tabel 3. 22	Standar Efisiensi Anggaran	49
Tabel 3. 23	Rincian Program Biro Organisasi Tahun 2020	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng	3
Gambar 1. 2	Rincian ASN dan Tenaga Kontrak Biro Organisasi	3
Gambar 3. 1	Diagram Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020.....	17
Gambar 3. 2	Perbandingan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Tengah.....	20
Gambar 3. 3	Diagram Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Per Tahun Anggaran	24
Gambar 3. 4	Progres Implementasi E-LHKPN di Provinsi Kalimantan Tengah.....	34
Gambar 3. 5	Rekapitulasi Wajib Lapo E-LHKPN Tahun Anggaran 2020.....	35
Gambar 3. 6	Grafik Penyampaian E-LHKPN Tahun Anggaran 2020.....	35
Gambar 3. 7	Perbandingan Wajib Lapo LHKPN.....	36
Gambar 3. 8	Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun	45



DAFTAR LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama 2020

Perjanjian Kinerja 2020

Rencana Aksi 2020

Rencana Kinerja Tahunan 2021

Ringkasan Capaian Keuangan Berdasarkan Program di Biro Organisasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan lingkungan strategis dan dinamis mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas fungsi. Salah satu perubahan lingkungan strategis adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga dapat memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Adapun prinsip yang mendasarnya, antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Mewujudkan hal tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Biro Organisasi merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, berkedudukan di bawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, dimana melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah bidang organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun pelaksanaan program Biro Organisasi mencakup berbagai aspek dengan tugas pokok menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tatalaksana, demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah.

Biro Organisasi mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tatalaksana pemerintahan.



B. Struktur Biro Organisasi

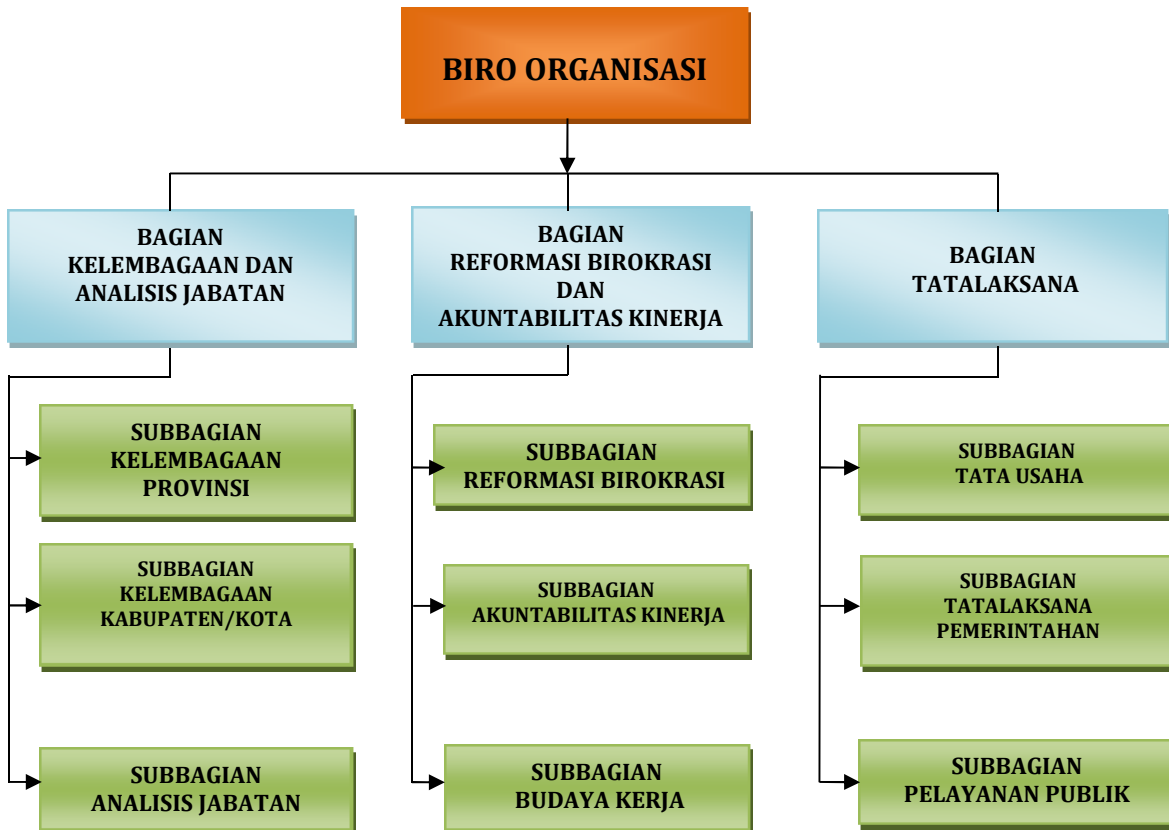
Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 adalah:

1. Kepala Biro Organisasi;
2. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, yaitu:
 - a. Subbagian Kelembagaan Provinsi;
 - b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - c. Subbagian Analisis Jabatan.
3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Subbagian Reformasi Birokrasi;
 - b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Subbagian Budaya Kerja.
4. Bagian Tatalaksana terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - c. Subbagian Pelayanan Publik.

Bagan struktur organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disajikan pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng



Sumber: Subbagian Tata Usaha, 2021

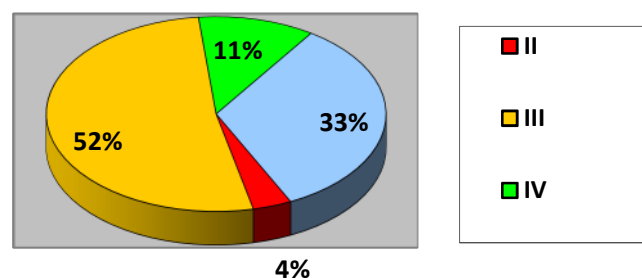
C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2
Rincian ASN dan Tenaga Kontrak Biro Organisasi



Sumber: Subbagian Tata Usaha, 2021



Adapun dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara sebanyak = 18 (delapan belas) orang
- b. Tenaga kontrak = 9 (sembilan) orang
- c. Menurut Golongan:
 - Golongan IV = 3 (tiga) orang
 - Golongan III = 14 (empat belas) orang
 - Golongan II = 1 (satu) orang
- d. Menurut Jabatan:
 - Eselon II/b = - orang
 - Eselon III/a = 2 (dua) orang
 - Eselon IV/a = 6 (enam) orang
- e. Menurut Pendidikan:
 - Sarjana S2 = 6 (enam) orang
 - Sarjana S1 = 10 (sepuluh) orang
 - SLTA = 2 (dua) orang
- f. Menurut Jenis Kelamin:
 - Laki-laki = 12 (dua belas) orang
 - Perempuan = 15 (lima belas) orang

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Daftar sarana prasarana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel 1.1.



Tabel 1. 1
Sarana dan Prasarana Penunjang

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	JUMLAH	KONDISI			
			Lengkap	Kurang	Mencukupi	Lainnya
A.	Alat Angkutan Darat Bermotor					
1.	Mini Bus	2 Unit			Mencukupi	
2.	Sepeda Motor	12 Unit			Mencukupi	
B.	Alat Kantor					
1.	Mesin Tik Manual	3 Buah			Mencukupi	
2.	Filing Besi/Metal	7 Buah			Mencukupi	
3.	Lemari Kayu	3 Buah			Mencukupi	
C.	Alat Kantor Lainnya					
1.	Alat Penghancur Kertas	1 Buah			Mencukupi	
2.	Overhead Projektor	1 Buah			Mencukupi	
D.	Meubelair					
1.	Meja Rapat	1 Set			Mencukupi	
E.	Alat Rumah Tangga Lainnya					
1.	Televisi	5 Buah			Mencukupi	
2.	Dispenser	1 Buah			Mencukupi	
F.	Peralatan Komputer					
1.	Komputer PC	17 Unit			Mencukupi	
2.	Lap Top	6 Unit			Mencukupi	
3.	Note Book	12 Unit			Mencukupi	
G.	Peralatan Komputer Mainframe					
1.	Hard Disk	5 Buah			Mencukupi	
H.	Peralatan Personal Komputer					
1.	Monitor	2 Buah			Mencukupi	
2.	Printer	22 Buah			Mencukupi	
3.	UPS	6 Buah			Mencukupi	
4.	Hard Disk Eksternal	5 Buah			Mencukupi	
I.	Peralatan Jaringan					
1.	Modem	1 Buah			Mencukupi	
J.	Meja Rapat Pejabat					
1.	Meja Tamu Ruangan Biasa	1 Buah			Mencukupi	
K.	Lemari dan Arsip Pejabat					
1.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1 Buah			Mencukupi	
L.	Peralatan Studio Visual					
1.	Camera + Attachment	3 Buah			Mencukupi	
2.	Proyektor + Attachment	3 Buah			Mencukupi	
3.	Layar Proyektor	1 Buah			Mencukupi	
M.	Peralatan studio Video dan Film A	2 Buah			Mencukupi	
1.	Peralatan studio Video dan Film A Lain-lain	1 Buah			Mencukupi	
N.	Alat Komunikasi					
1.	Pesawat Telepon	2 Buah			Mencukupi	
2.	Mesin Fax	1 Buah			Mencukupi	
O.	Buku Perpustakaan					
1.	Buku Umum (Perundang-Undangan)	118 Buah			Mencukupi	
Q.	Lainnya					
1.	AC	9 Buah			Mencukupi	
2.	Kursi Tamu	5 Set			Mencukupi	
3.	Meja Rapat	1 Set			Mencukupi	
II.	Prasarana Penunjang					
1.	Kantor	1 Ruangan			Mencukupi	

Sumber: Subbagian Tata Usaha, 2021



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, bersifat jangka menengah, secara sistematis berkesinambungan. Proses ini menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja yang berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dengan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan. Melalui dokumen perencanaan selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan untuk dapat dicapai.

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam rangka mendukung pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun visi Biro Organisasi adalah:

**” Terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan yang Baik
(Good Governance) dalam Pelayanan Publik melalui Organisasi Perangkat
Daerah yang Efektif, Efisien dan Rasional “**

2. Misi

Adapun misi yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang profesional dan tangguh dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan;
- b. Meningkatkan pemberdayaan aparatur secara optimal;
- c. Meningkatkan penataan kelembagaan yang hemat struktur kaya fungsi (tepat ukuran dan tepat fungsi);
- d. Meningkatkan budaya kerja, budaya tertib dan budaya bersih;
- e. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
- f. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);



- g. Meningkatkan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- h. Meningkatkan kualitas penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi dan mendorong pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik;
- j. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Tujuan

Penjabaran dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun, sebagai implementasi misi diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang profesional dan tangguh dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan, dengan tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan penyusunan bahan kebijakan pemerintah yang fleksibel sebagai antisipasi perubahan regulasi;
 - Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan;
 - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan sebagai relevansi perubahan nomenklatur.
- b. Meningkatkan pemberdayaan aparatur secara optimal, dengan tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan kesadaran aparatur dalam melakukan perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani;
 - Meningkatkan pemahaman terhadap beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemangku jabatan.
- c. Meningkatkan penataan kelembagaan yang hemat struktur kaya fungsi (tepat ukuran dan tepat fungsi), dengan tujuan sebagai berikut:
 - Mengimplementasikan penataan kelembagaan yang proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi daerah;



- Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan kelembagaan dengan meminimalisir kepentingan yang bersifat egosektoral;
 - Meningkatkan sinkronisasi antara regulasi dengan kebutuhan kelembagaan perangkat daerah.
- d. Meningkatkan budaya kerja, budaya tertib dan budaya bersih dengan tujuan sebagai berikut:
- Meningkatkan pemahaman pemangku jabatan terhadap tanggung jawab jabatan dan mampu memberikan kontribusi untuk mencapai hasil dan tujuan organisasi salah satunya pelaksanaan penyusunan analisis jabatan.
- e. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, dengan tujuan sebagai berikut:
- Meningkatkan mekanisme dan sistem pengawasan internal pemerintah.
- f. Meningkatkan kualitas penyusunan LKIP, dengan tujuan sebagai berikut:
- Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam menentukan indikator capaian kinerja organisasi PD berdasarkan sumber daya yang dikelola untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas dokumen LKIP.
- g. Meningkatkan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan tujuan sebagai berikut:
- Meningkatkan profesionalisme dan proporsionalisme dalam pelaksanaan administrasi dan kebijakan bidang organisasi.
- h. Meningkatkan kualitas penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan mendorong pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi, dengan tujuan sebagai berikut:
- Membangun komitmen pimpinan dalam penyusunan dan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- i. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik, dengan tujuan sebagai berikut:
- Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan tugas pokok fungsinya, pengembangan inovasi pelayanan serta komitmen dalam mengimplementasikan SPM.
- j. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan tujuan sebagai berikut:



- Meningkatkan kepatuhan aparatur sebagai wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Sasaran

Sasaran jangka menengah pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- Meningkatkan aparatur yang handal dan profesional;
- Meningkatnya kualitas pegawai dalam menyusun LKIP;
- Tersedianya perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - Terwujudnya organisasi PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
 - Tersusunnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tugas pokok dan fungsi;
 - Terlaksananya penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Meningkatnya kinerja organisasi PD;
- Tersedianya informasi jabatan lingkup PD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Tersusunnya formasi jabatan;
 - Tersedianya dokumen tentang informasi analisis beban kerja perangkat daerah;
 - Terwujudnya pemeringkatan, nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Meningkatnya hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Terlaksananya deteksi dini dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme oleh penyelenggara negara;
 - Meningkatnya penyelenggara negara yang taat dan sadar untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
 - Meningkatnya ASN yang taat dan sadar untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN).



- h. - Terlaksananya *good governance* di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Terlaksananya optimalisasi pendayagunaan Aparatur Negara dan inventarisasi permasalahan Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) di daerah.
- i. Terlaksananya pengawasan penyelenggara negara secara berjenjang dan melibatkan semua unsur pejabat.
- j. - Terwujudnya pelayanan publik yang prima;
 - Meningkatnya kemampuan dan kualitas pegawai dalam melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - Meningkatnya kemampuan dan kualitas pegawai dalam melakukan survei Indeks Pelayanan Minimal (IPM);
 - Meningkatnya kualitas pegawai dalam menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - Meningkatnya kualitas pegawai dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Meningkatnya prestasi dalam penyelenggaraan kompetisi pelayanan publik.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK 2020 Biro Organisasi dibuat untuk menyelesaikan aspek strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kinerja prioritas utama yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari Renstra dengan orientasi hasil. Mewujudkan sasaran jangka menengah telah ditetapkan sasaran strategis dan IKU Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, adapun perjanjian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2. 1
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
Meningkatnya Nilai (Kategori) Penyusunan Laporan Kinerja LAPKIN yang baik dan benar	1. Kategori LKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	75	Nilai
	2. Jumlah SKPD yang menyusun LKIP yang baik	38	PD
	Nilai kategori = AA > 90-100 (sangat memuaskan)	0	PD
	Nilai kategori = A > 80-90 (memuaskan)	0	PD
	Nilai kategori = BB > 70 - 80 (sangat baik)	3	PD
	Nilai kategori = B > 60-70 (baik, perlu perbaikan)	19	PD
	Nilai kategori = CC > 50-60 (cukup)	13	PD
	Nilai kategori = C > 30-50 (kurang, perlu banyak perbaikan)	3	PD
	Nilai kategori = D > 0-30 (sangat kurang)	0	PD
Tersusunnya Perda dan Pergub UPTD Provinsi, Kab/Kota	1. Jumlah Perda dan Pergub UPTD	90	UPTD
Meningkatnya Akurasi dan Kualitas Analisis Jabatan SKPD Pemerintah Provinsi	1. Jumlah Jabatan pada SKPD yang dilakukan analisis	4.459	Jabatan
	2. Jumlah Formasi Jabatan	10.343	Orang
Meningkatnya Transparansi kepemilikan Harta Kekayaan ASN (Pejabat) Pemerintah Prov. Kalteng	1. Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN	530	Orang
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, dengan tumbuhnya inovasi pelayanan	1. Jumlah Inovasi pada SKPD Prov. Kalteng	10	Inovasi
	2. Jumlah SOP yang tersusun pada SKPD	46	Dokumen
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik	86	Indeks
Meningkatnya hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1. Indeks reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	80	Indeks

Sumber: Renstra 2016-2021, PK 2020 Biro Organisasi, 2020



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi organisasi melalui alat pertanggungjawaban secara periodik dalam bentuk laporan kinerja. Memenuhi maksud tersebut, untuk menilai keberhasilan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2020. Hasil pengukuran capaian target kinerja disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator sasaran strategis. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana menggunakan pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perhitungan pengukuran kinerja mencakup prosentase pencapaian rencana tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai. Perlunya ditetapkan cara pengukuran kinerja sebagai bukti bahwa keberhasilan pelaksanaan kinerja di Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Kalteng sudah akuntabel dan pembanding bagi proses pengukuran kinerja untuk tahun berikutnya.

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah berdasarkan persentase capaian rata-rata atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Skala Nilai Pencapaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
II	$76 \leq 90$	Tinggi
III	$60 \leq 75$	Sedang
IV	$40 \leq 59$	Rendah
V	$20 \leq 39$	Sangat Rendah
VI	$0 < 19$	Paling Rendah

Pencapaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 secara menyeluruh dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Biro Organisasi Setda Prov Kalteng Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
				Tahun	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Nilai (Kategori) Penyusunan Laporan Kinerja LAPKIN yang baik dan benar	1 Kategori LKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	2016	61,21	75	63,05	84,07
				2017	61,35			
				2018	62,86			
				2019	63,05			
		2 Jumlah SKPD yang menyusun LKIP yang baik	PD	2016	13	38	25	65,79
				2017	26			
				2018	28			
				2019	35			



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
				Tahun	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		Nilai kategori = AA > 90-100 (sangat memuaskan)	PD	2016	-	-	-	-
				2017	-			
				2018	-			
				2019	-			
		Nilai kategori = A >80-90 (memuaskan)	PD	2016	-	-	-	-
				2017	-			
				2018	-			
				2019	-			
		Nilai kategori = BB >70 - 80 (sangat baik)	PD	2016	-	3	6	100
				2017	-			
				2018	2			
				2019	3			
		Nilai kategori = B > 60-70 (baik, perlu perbaikan)	PD	2016	3	19	19	100
				2017	13			
				2018	14			
				2019	19			
		Nilai kategori = CC >50-60 (cukup)	PD	2016	10	13	10	76,92
				2017	13			
				2018	12			
				2019	13			
		Nilai kategori = C > 30-50 (kurang, perlu banyak perbaikan)	PD	2016	21	3	3	100
				2017	6			
				2018	7			
				2019	3			
		Nilai kategori = D > 0-30 (sangat kurang)	PD	2016	-	-	-	-
				2017	1			
				2018	1			
				2019	-			



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
					Tahun	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
2	Tersusunnya Perda dan Pergub UPTD Provinsi, Kab/Kota	1	Jumlah Perda dan Pergub UPTD	UPTD	2016	1	90	349	100
					2017	5			
					2018	62			
					2019	349			
3	Meningkatnya Akurasi dan Kualitas Analisis Jabatan SKPD Pemerintah Provinsi	1	Jumlah Jabatan pada SKPD yang dilakukan analisis	Jabatan	2016	2727	4459	4451	99,82
					2017	2429			
					2018	3652			
					2019	4459			
		2	Jumlah Formasi Jabatan	Orang	2016	5036	10343	10331	99,82
					2017	5046			
					2018	5046			
					2019	10150			
4	Meningkatnya Transparansi kepemilikan Harta Kekayaan ASN (Pejabat) Pemerintah Prov. Kalteng	1	Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN	Orang	2016	371	530	456	86,04
					2017	218			
					2018	482			
					2019	540			
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, dengan tumbuhnya inovasi pelayanan	1	Jumlah Inovasi pada SKPD Prov. Kalteng	Inovasi	2016	32	10	6	60
					2017	20			
					2018	8			
					2019	8			
		2	Jumlah SOP yang tersusun pada SKPD	Dokumen	2016	110	46	46	100
					2017	45			
					2018	45			
					2019	46			



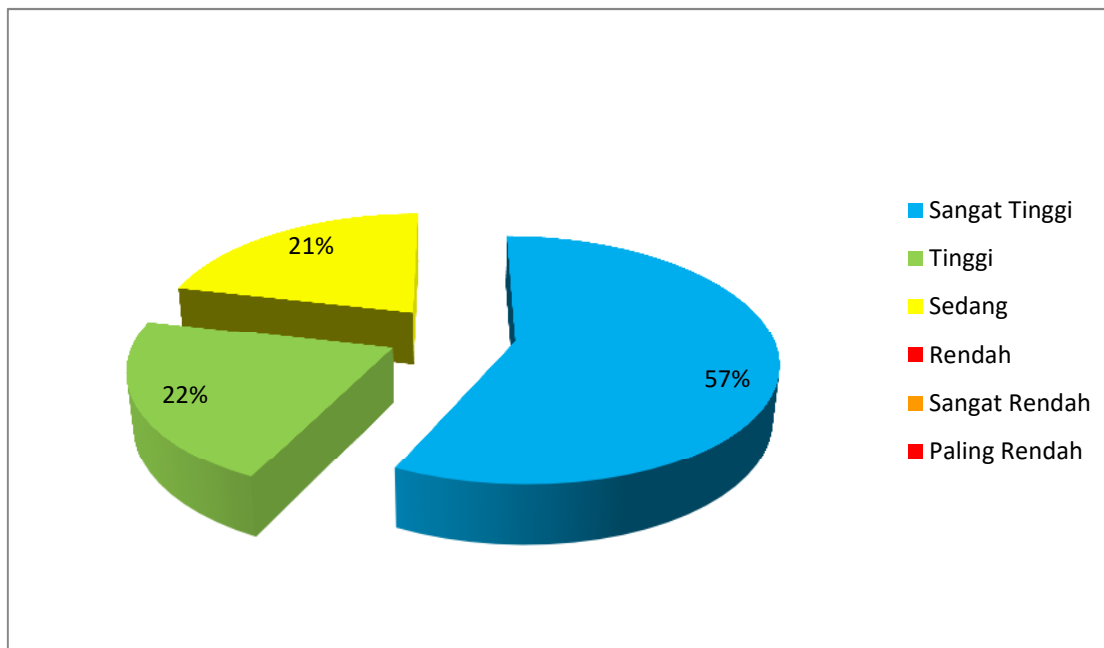
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
				Tahun	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik		2016	0		
					2017	74,33		
					2018	76,93	86	83,02
					2019	80,06		96,53
6.	Meningkatnya hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1	Indeks reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		2016	56,80		
					2017	59,70	80	59,59
					2018	59,28		
					2019	59,59		74,49
Total Capaian								1.243,48
Rara-rata Realisasi Kinerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2020 (Total Capaian/Jumlah Indikator)								88,82

Dari 6 (enam) sasaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijabarkan realisasinya sebagai berikut :

1. 8 (delapan) Indikator menunjukkan hasil sangat Tinggi;
2. 3 (tiga) Indikator menunjukkan hasil Tinggi;
3. 3 (tiga) Indikator menunjukkan hasil Sedang;
4. 0 (nol) Indikator menunjukkan hasil Rendah;
5. 0 (nol) Indikator menunjukkan hasil Sangat Rendah;
6. 0 (nol) Indikator menunjukkan hasil Paling Rendah.



Gambar 3. 1 Diagram Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020



B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, maka dapat dijabarkan realisasi kinerja yang telah dicapai Biro Organisasi pada Tahun Anggaran 2020 :

Tabel 3. 3
Realisasi Kinerja Biro Organisasi Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Target RPJMD Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
B. ASPEK PELAYANAN UMUM										
IV. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah										
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	84	80,06	95,31	86	83,02	96,53	88	94,34
2.2	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Nilai	75	63,05	84,07	BB (75)	B 63,05 (TA 2019)	84,07	A (80)	78,81
2.3	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks	75	59,59	79,45	80	59,59 (TA 2019)	74,49	85	70,11
2.4	Perda/Pergub Kelembagaan Organisasi Daerah	Perda/ Pergub	1 Perda, 5 Pergub	0 Perda, 5 Pergub	0 Perda, 4 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	0 Perda, 5 Pergub	50	1 Perda, 5 Pergub	50

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha, 2020, data primer



Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun anggaran 2020, tentunya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan baik dari faktor dalam maupun faktor luar Biro Organisasi. Kendala dan Permasalahan tersebut memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja maupun realisasi. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pandemi covid-19 menyebabkan seluruh kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Organisasi yang terbatas dan masih perlu peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan di bidangnya sehingga belum dapat memberikan pelayanan maksimal;
3. Rasionalisasi Anggaran sehingga mengurangi anggaran program/kegiatan yang telah direncanakan.

Agar pencapaian kinerja sasaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal maka diupayakan strategi pemecahan masalah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang kompeten dan bisa diandalkan di Biro Organisasi;
2. Merancang rencana efisiensi anggaran dalam menunjang program Biro Organisasi dimana pada tahun 2021 akan terjadi perubahan Perangkat Daerah dan Nomenklatur yang mana berdampak pada perubahan anggaran;

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, selanjutnya akan disajikan analisis capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Melakukan evaluasi kinerja perlu digunakan pembanding beserta analisis capaian kinerja yang terdiri atas :

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja;
2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
3. Pengukuran capaian kinerja dengan tahun sebelumnya;
4. Membandingkan pengukuran kinerja dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Berikut analisis capaian indikator kinerja per sasaran strategis :



SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya Nilai (Kategori) Penyusunan Laporan Kinerja
LAPKIN yang baik dan benar

Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu persyaratan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang dijabarkan sasaran strategis, yaitu :

1. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil capaian kinerja, hasil evaluasi dari Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalteng terus mengalami peningkatan disajikan pada tabel berikut ini :

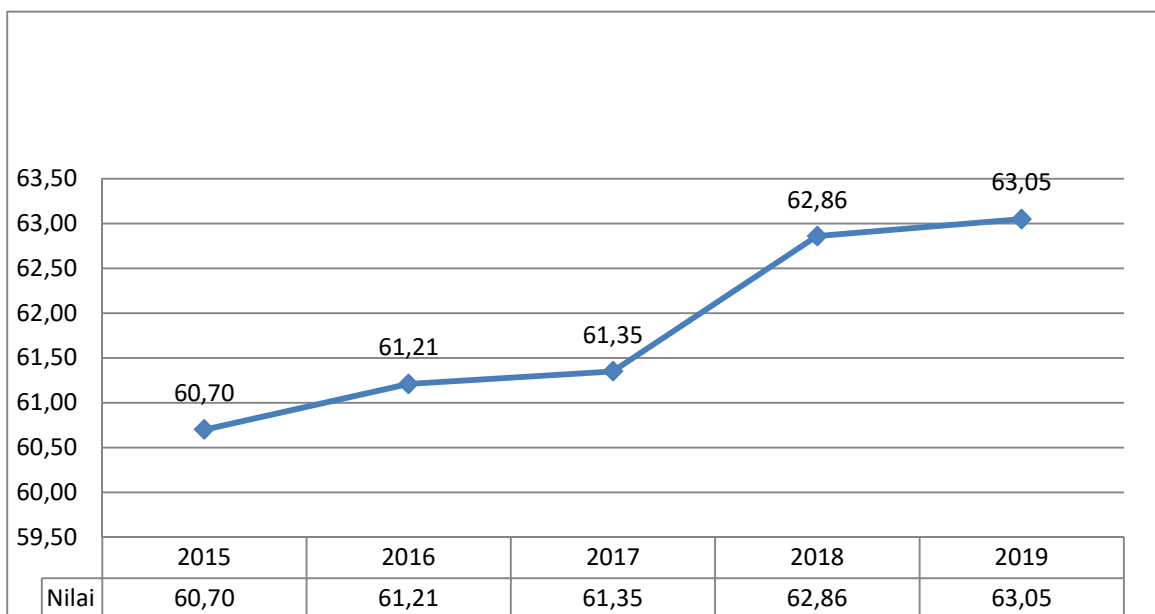
Tabel 3. 4
Hasil Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Laporan Kinerja	Penilaian	Hasil Evaluasi	
		Nilai	Kategori
Laporan Kinerja 2015	Penilaian 2016	60,70	B
Laporan Kinerja 2016	Penilaian 2017	61,21	B
Laporan Kinerja 2017	Penilaian 2018	61,35	B
Laporan Kinerja 2018	Penilaian 2019	62,86	B
Laporan Kinerja 2019	Penilaian 2020	63,05	B
Laporan Kinerja 2020	Penilaian 2021	Masih belum tersedia	
Laporan Kinerja 2021	Penilaian 2022	Setelah Tahun Anggaran selesai	

Sumber: Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja, 2020, data primer

Hasil Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terakhir memperoleh nilai 63,05 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa transparansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah secara perlahan meningkat. Gambaran mengenai kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam sasaran pembangunan daerah 5 tahun kedepan disajikan pada gambar berikut ini :





Gambar 3. 2 Perbandingan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil evaluasi LKIP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 menunjukkan peningkatan nilai walaupun masih kategori nilai B. Berikut penjabaran hasil evaluasi LKIP Provinsi Kalimantan Tengah disajikan tabel ini

Tabel 3. 5
Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai			
			2016	2017	2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,66	21,73	21,56	21,56
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,11	13,66	14,32	14,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,33	10,21	10,64	10,65
d.	Evaluasi Kinerja	10	5,76	5,46	5,91	5,95
e.	Capaian Kinerja	20	10,36	10,29	10,44	10,52
Nilai Hasil Evaluasi		100	61,21	61,35	62,86	63,05
Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B

Sumber: Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja, 2020

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebagian besar PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng belum memperbaiki tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil, baik Renstra, maupun PK. Perumusan tujuan dan sasaran yang belum sesuai



mengakibatkan perumusan kinerja untuk level eselon III dan IV di PD tersebut juga belum menunjukkan kualitas yang baik;

- b. IKU yang telah disusun masih sebatas pemenuhan dokumen, belum dijadikan alat ukur kinerja baik untuk tingkat Kabupaten/ Kota maupun PD;
- c. Seluruh PD telah menyusun Laporan Kinerja, namun belum seluruhnya membahas kinerja secara mendalam, sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta serapan anggaran di PD;
- d. Penjabaran kinerja dari tingkat Provinsi sampai ke individu yang diformalkan menjadi perjanjian kinerja berjenjang belum sepenuhnya terkait dengan kinerja level di atasnya. Hal ini disebabkan karena penjabaran kinerja belum berpedoman pada proses bisnis yang ada;
- e. Pemantauan atas pencapaian kinerja di level PD belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan, informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme pemantauan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja yang diperlukan;
- f. Evaluasi atas program yang dilakukan sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program sehingga terdapat ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program serta peran yang diemban oleh setiap PD;
- g. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat terkesan belum memberikan dampak peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan internal PD;
- h. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum berperan secara optimal untuk mendorong penguatan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Sehingga perkembangan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan.

Upaya yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah:

- a. Menindaklanjuti perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah disusun dan diformalkan menjadi dokumen yang legal dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran. Dokumen



- perencanaan tingkat provinsi harus memiliki keterpaduan dengan perencanaan (integrated development plan) tingkat PD;
- b. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan baik di level Provinsi maupun di level PD untuk memastikan bahwa rumusan kinerja yang ingin dicapai telah berorientasi hasil sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja di level Provinsi dan PD;
 - c. Menyempurnakan keselarasan ukuran kinerja dari level Pemerintah Provinsi sampai ke individu, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap level organisasi sampai individu pegawai pelaksana memiliki kontribusi kinerja yang jelas secara berjenjang sesuai levelnya dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah. Disamping itu perlu adanya reviu kinerja berjenjang secara berkala;
 - d. Menyusun peta proses bisnis dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga dapat menghasilkan gambaran proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi. Selanjutnya menggunakan proses bisnis ini untuk memastikan bahwa penjabaran kinerja yang sudah disusun secara berjenjang saling terkait satu sama lain;
 - e. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran;
 - f. Meningkatkan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas baik di internal maupun pada Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga hasil evaluasi yang dilakukan dapat menggambarkan penerapan SAKIP yang obyektif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan SAKIP secara berkelanjutan. Memastikan bahwa saran atau rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan monitoring terhadap tindaklanjutnya. Sehingga evaluasi ini dapat memberikan perbaikan yang nyata kepada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan SAKIP;
 - g. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan



penganggaran serta membangun mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian reward and punishment.

- h. Mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih mengoptimalkan pembinaan SAKIP kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah agar terwujud kualitas implementasi SAKIP yang semakin baik.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP-PD Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun anggaran 2020 diperoleh data yang disajikan pada tabel.

Tabel 3. 6
Hasil Evaluasi LKIP PD Provinsi Kalimantan Tengah

Kategori	Rekapitulasi Hasil Evaluasi LKIP Tahun Anggaran					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kategori BB (Sangat Baik) Nilai > 70-80	-	-	-	2 PD	3 PD	6 PD
Kategori B (Baik) Nilai > 60-70	-	3 PD	13 PD	14 PD	19 PD	19 PD
Kategori CC (Cukup/Memadai Baik) Nilai > 50-60	20 PD	10 PD	13 PD	12 PD	13 PD	10 PD
Kategori C (Kurang) Nilai > 30-50	13 PD	21 PD	6 PD	7 PD	3 PD	3 PD
Kategori D (Sangat Kurang) Nilai 0 - 30	2 PD	-	1 PD	1 PD	-	-
JUMLAH PD	35 PD	34 PD	33 PD	36 PD	38 PD	38 PD

Sumber: Subbagian Akuntabilitas Kinerja, 2020, data primer

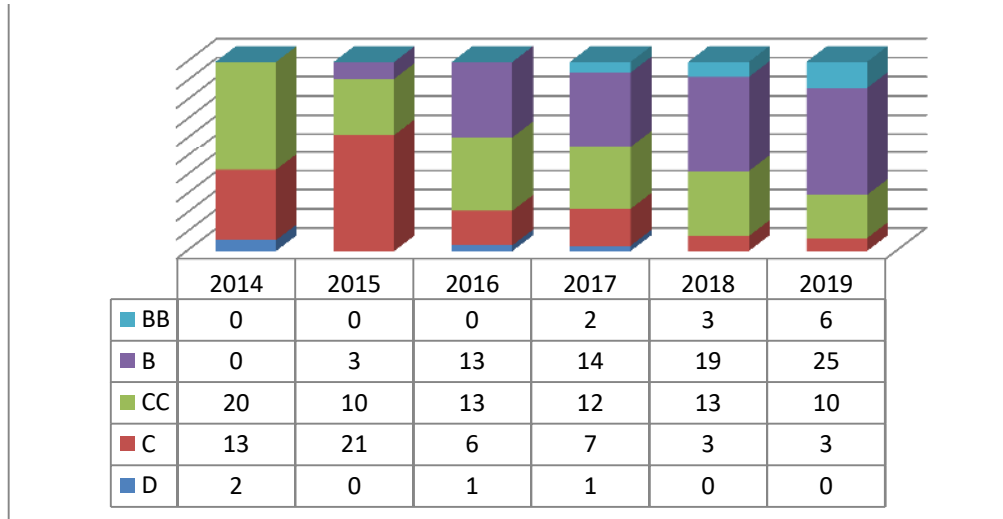
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pelaporan kinerja tiap PD di Provinsi Kalteng adalah:

- a. LKIP PD dengan kategori B (Baik) dan BB (Sangat Baik) sebanyak 25 PD dari 38 PD yang dievaluasi (65,78%) yang berarti akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
- b. LKIP PD dengan kategori CC (Cukup/Memadai) sebanyak 10 PD (26,31%) yang berarti akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu perbaikan yang tidak mendasar.



- c. LKIP PD dengan Kategori C (Kurang) sebanyak 3 PD (7,89%) yang berarti sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.

Gambar 3. 3
Diagram Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Per Tahun Anggaran



Sumber: Subbagian Akuntabilitas Kinerja, 2021, data primer

Sebagai penguatan akuntabilitas kinerja pada PD Provinsi Kalimantan Tengah, maka disarankan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah agar menjadi perhatian antara lain:

- PK dibuat berdasarkan dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan, PK memuat indikator kinerja dan target kinerja tahunan berpedoman RKT dan disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia pada DPA;
- Penyusunan Renja, PK, dan IKU harus memuat indikator sasaran berkaitan;
- Membuat Rencana Aksi yang merupakan penjabaran target-target kinerja yang ditetapkan dalam PK ke dalam periode bulan/triwulan/semester;
- Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala (bulan/triwulan/semester) terhadap pencapaian kinerja.

SASARAN STRATEGIS 2


Tersusunnya Perda dan Pergub UPTD Provinsi, Kabupaten/Kota

Unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Melaksanakan kewenangan Provinsi di daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai pembentukannya memerlukan izin yang berkekuatan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang difasilitasi oleh Biro Organisasi dan selanjutnya dilimpahkan ke Biro Hukum sebagai proses akhir persetujuan. Berdasarkan data terakhir Peraturan Gubernur yang telah disahkan hingga tahun 2020 disajikan pada tabel ini.



Tabel 3. 7
Pergub UPTD Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nomenklatur UPT dan Cabang Dinas		Kelas			Perumpunan	Nomor Perkada
			A	B	-		
1	2		3	4	5	6	7
Provinsi Kalimantan Tengah							
1.	UPT Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng						Nomor 10 Tahun 2017
	a.	UPT – KPHP Murung Raya	A			Kehutanan	
	b.	UPT – KPHP Barito Hulu	A			Kehutanan	
	c.	UPT – KPHP Barito Tengah	A			Kehutanan	
	d.	UPT – KPHP Barito Hilir	A			Kehutanan	
	e.	UPT – KPHP Kapuas Hulu	A			Kehutanan	
	f.	UPT – KPHP Kapuas Tengah	A			Kehutanan	
	g.	UPT – KPHP Kahayan Hulu	A			Kehutanan	
	h.	UPT – KPHP Kahayan Tengah	A			Kehutanan	
	i.	UPT – KPHP Kahayan Hilir	A			Kehutanan	
	j.	UPT – KPHP Katingan Hulu	A			Kehutanan	
	k.	UPT – KPHP Katingan Hilir	A			Kehutanan	
	l.	UPT – KPHP Mentaya Hulu – Seruyan Tengah	A			Kehutanan	
	m.	UPT – KPHP Seruyan Hulu	A			Kehutanan	
	n.	UPT – KPHP Mentaya Tengah – Seruyan Hilir	A			Kehutanan	
	o.	UPT – KPHP Kotawaringin Barat	A			Kehutanan	
	p.	UPT – KPHP Sukamara - Lamandau	A			Kehutanan	
	q.	UPT – KPHL Kapuas - Kahayan	A			Kehutanan	
	r.	UPT – KPHL Gerbang Barito	A			Kehutanan	
2.	UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng						Nomor 42 Tahun 2017
	a.	Balai Pelatihan Kesehatan	A			Kesehatan	
	b.	Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	A			Kesehatan	
3.	UPT Dinas Sosial Provinsi Kalteng						Nomor 45 Tahun 2017
	a.	UPT Panti Sosial Tresna Werdha	A			Sosial	
	b.	UPT Panti Sosial Bina Remaja	A			Sosial	
	c.	UPT Panti Sosial Karya Wanita		B		Sosial	
	d.	UPT Panti Sosial Bina Laras Pembelum	A			Sosial	
4.	UPT Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalteng						Nomor 5 Tahun 2020
	a.	UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	A			Perdagangan dan Perindustrian	

Tabel 3.6 Lanjutan

No	Nomenklatur UPT dan Cabang Dinas		Kelas			Perumpunan	Nomor Perkada
			A	B	-		
1	2		3	4	5	6	7
5.	UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalteng						Nomor 60 Tahun 2017
	a.	UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	A			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6.	UPT Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalteng						Nomor 44 Tahun 2017
	a.	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	A			Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	b.	UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	A			Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	c.	UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	A			Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	d.	UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	A			Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	e.	UPT Balai Pengujian Mutu Pakan, Perbibitan dan Hijauan Makan Ternak	A			Tanaman Pangan Hortikultura, dan Peternakan	
7.	UPT Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah						Nomor 55 Tahun 2017
	a.	UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih	A			Perkebunan	
	b.	UPT Balai Benih dan Kebun Produksi	A			Perkebunan	
8.	UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalteng						Nomor 56 Tahun 2017
	a.	UPT Balai Latihan Kerja	A			Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	b.	UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan di Pangkalanbun dengan wilayah kerja Kotawaringin Barat		B		Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	c.	UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan di Sampit		B		Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
9.	UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalteng						Nomor 57 Tahun 2017
	a.	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



Tabel 3.6 Lanjutan

No	Nomenklatur UPT dan Cabang Dinas		Kelas			Perumpungan	Nomor Perkada
			A	B	-		
1	2		3	4	5	6	7
10	UPT Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalteng						NOMOR 52 TAHUN 2017
	a.	UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	A			Kelautan dan Perikanan	
	b.	UPTD Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran.	A			Kelautan dan Perikanan	
	c.	UPTD Pelabuhan Perikanan Kumai	A			Kelautan dan Perikanan	
	d.	UPTD Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	A			Kelautan dan Perikanan	
11	UPT Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalteng						NOMOR 53 TAHUN 2017
	a.	Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral (UPPT ESDM)	A			Energi dan Sumber Daya Mineral	
12	UPT Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng						
	a.	Balai Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan	A			Pendidikan	NOMOR 54 TAHUN 2017
	b.	Satuan Pendidikan			286	Pendidikan	NOMOR 57 TAHUN 2018
13	UPT Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalteng						NOMOR 46 TAHUN 2017
	a.	UPT Museum Balanga Palangka Raya	A			Kebudayaan dan Pariwisata	
	b.	Taman Budaya Kalteng Palangka Raya	A			Kebudayaan dan Pariwisata	
14	UPT Badan Pendapatan Daerah						NOMOR 22 TAHUN 2018
	a.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya	A			Pendapatan Daerah	
	b.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan	A			Pendapatan Daerah	
	c.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	A			Pendapatan Daerah	
	d.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	A			Pendapatan Daerah	
	e.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan	A			Pendapatan Daerah	
	f.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	A			Pendapatan Daerah	
	g.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara	A			Pendapatan Daerah	
	h.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas	A			Pendapatan Daerah	
	i.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur	A			Pendapatan Daerah	
	j.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Babelo Selatan	A			Pendapatan Daerah	



Tabel 3.6 Lanjutan

No	Nomenklatur UPT dan Cabang Dinas		Kelas			Perumpunan	Nomor Perkada
			A	B	-		
1	2		3	4	5	6	7
	k.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Berito Utara	A			Pendapatan Daerah	
	l.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau	A			Pendapatan Daerah	
	m.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas	A			Pendapatan Daerah	
	n.	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya	A			Pendapatan Daerah	
15	UPT Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						NOMOR 20 TAHUN 2019
	a.	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	A			Perlindungan Perempuan dan Anak	
16	Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral						NOMOR 61 TAHUN 2017
	a.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I		B		Energi dan Sumber Daya Mineral	
	b.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II		B		Energi dan Sumber Daya Mineral	
	c.	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III		B		Energi dan Sumber Daya Mineral	
TOTAL			57	6	286		349

Sumber: Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 2020, data primer



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akurasi dan Kualitas Analisis Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mewujudkan peningkatan sumber daya aparatur yang profesional melalui Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Dalam rangka penyediaan informasi yang akurat dan transparan tentang jabatan dan formasi jabatan yang tersedia di Pemerintah Provinsi Kalteng. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan telah mendata jumlah jabatan yang ada di Pemerintah Provinsi Kalteng dari tahun ke tahun melalui diseminasi dan asistensi tata cara pengisian formulir formasi jabatan dan kegiatan lainnya.

Berdasarkan data terakhir yang terkumpul di Biro Organisasi di tahun 2020, rincian pada tabel berikut :

Tabel 3. 8
Rincian Jabatan di Provinsi Kalteng Tahun 2020

Rekapitulasi	Jumlah	Satuan
Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	38	PD
Total Jabatan di Pemprov Kalteng	4.451	Jabatan
Total Jabatan yang Teranalisa	10.331	Orang

Sumber: Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 2020, data primer

Tabel 3. 9
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	PERANGKAT DAERAH	TIPE
1.	Sekretariat DPRD	C
2.	Inspektorat	B
3.	RSUD Dr. Doris Sylvanus	B
4.	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	C
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	A
6.	Dinas Pendidikan	A
7.	Dinas Kesehatan	A
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B
10.	Dinas Sosial	A
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
13.	Dinas Ketahanan Pangan	B
14.	Dinas Lingkungan Hidup	A
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	C
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
17.	Dinas Perhubungan	B
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	A
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga	A
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A
23.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	A
24.	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
25.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	A
26.	Dinas Perkebunan	A
27.	Dinas Kehutanan	A
28.	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral	A
29.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	A
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	A
31.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	B
32.	Badan Kepegawaian Daerah	A
33.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A
34.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	-
35.	Badan Penghubung	-
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A
37.	Badan Pendapatan Daerah	C
38.	Sekretariat Daerah	A

Sumber: Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 2020, data primer



Tabel 3. 10
Rekapitulasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	16	1
2	15	41
3	14	17
4	13	6
5	12	93
6	11	1852
7	10	68
8	9	2237
9	8	2437
10	7	1453
11	6	1336
12	5	650
13	4	1
14	3	74
15	2	0
16	1	65
Jumlah		10.331

Sumber: Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 2020, data primer

Tabel 3. 11
Jumlah Jabatan yang Menempati Jabatan

Tahun	Target	Capaian
2016	5.036	5.056
2017	5.046	4.817
2018	5.046	10.150
2019	10.150	10.343
2020	10.343	10.331

Sumber: Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 2020, data primer

Tabel 3. 12
Rekapitulasi Jabatan Lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket
1.	Jabatan Struktural	1.069	
2.	Jabatan Fungsional	3.382	
	Total	4.451	

Sumber: Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 2020, data primer

SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya Transparansi kepemilikan Harta Kekayaan ASN
(Pejabat) Pemerintah Provinsi Kalteng

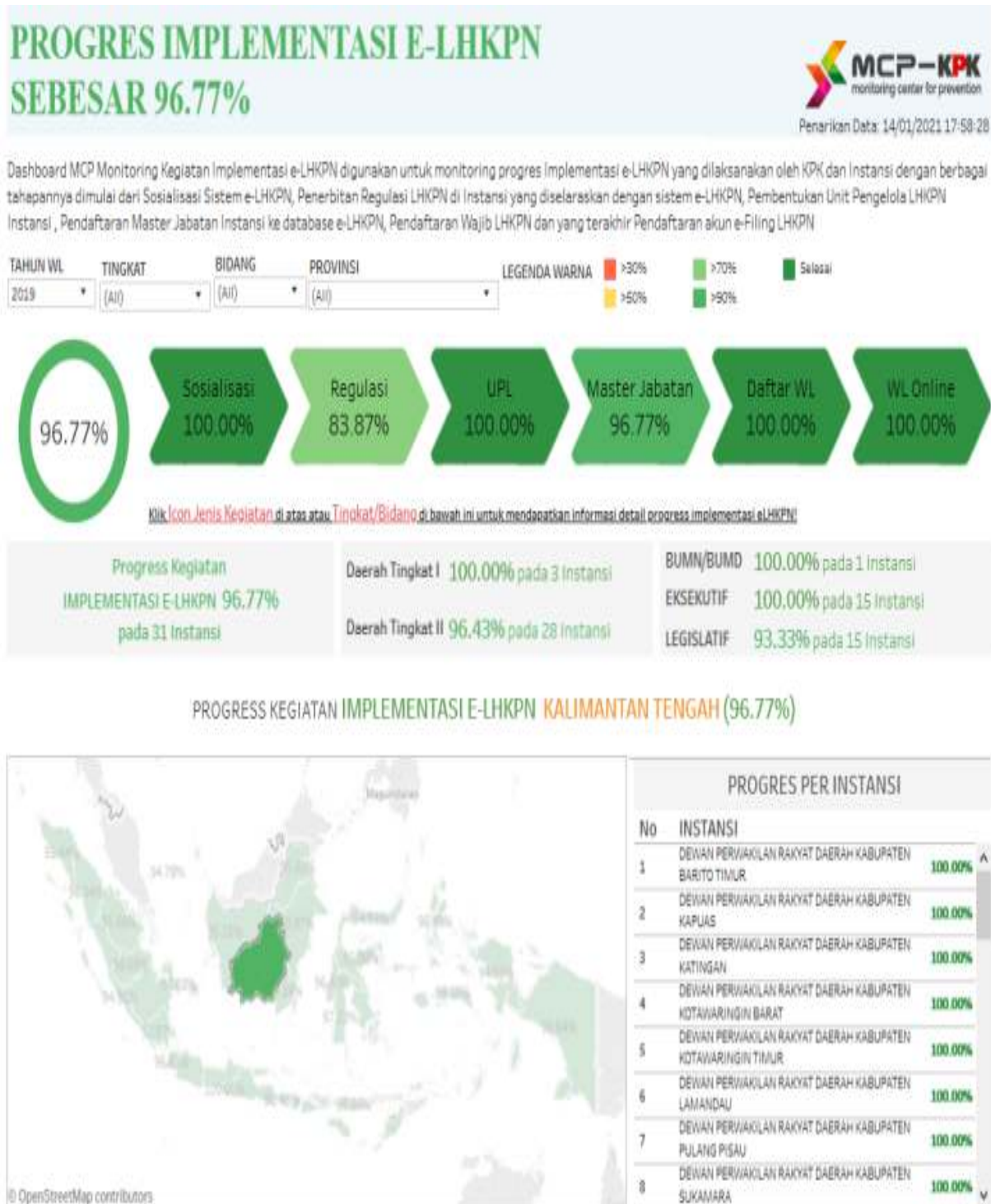
Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wujud transparansi laporan kepemilikan harta kekayaan ASN yang termasuk dalam wajib lapor dalam Laporan Harta Kepemilikan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini berdasarkan Peraturan Undang – Undang mengenai LHKPN, Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Bagian Pengembangan Kinerja Aparatur Pemerintah pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah maka didapatkan data wajib lapor LHKPN pada akhir Triwulan III yang mana telah terintegrasi dengan aplikasi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang alamat websitenya adalah : <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>



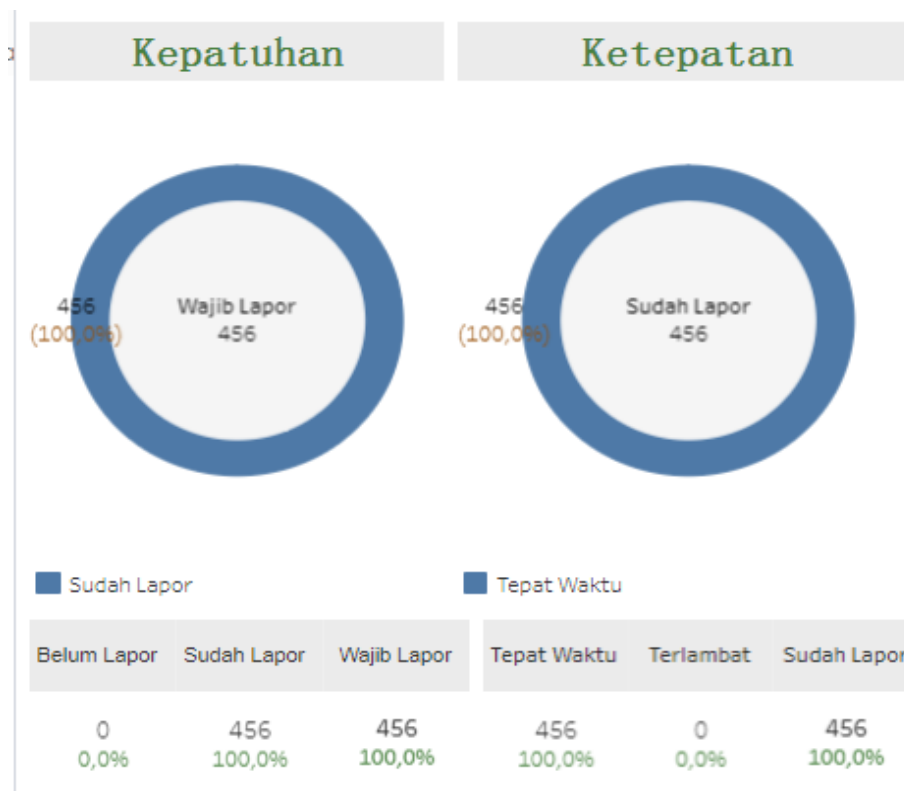
Gambar 3. 4
Progres Implementasi E-LHKPN di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: <https://elhkp.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>

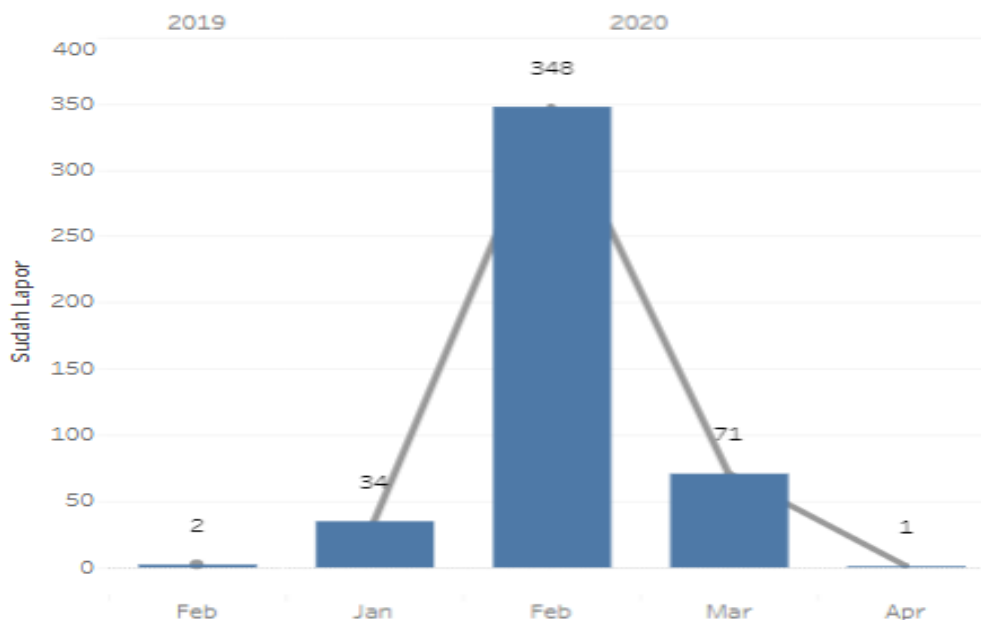


Gambar 3. 5
Rekapitulasi Wajib Lapor E-LHKPN Tahun Anggaran 2020



Sumber: Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, 2020, data primer

Gambar 3. 6
Grafik Penyampaian E-LHKPN Tahun Anggaran 2020



Sumber: Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, 2020, data primer

Tingkat Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Data dari Pendaftaran Pelaporan LHKPN ke KPK Republik Indonesia berikut :

Tabel 3. 13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
		2020			
Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan LHKPN	Orang	530	456	86,04	

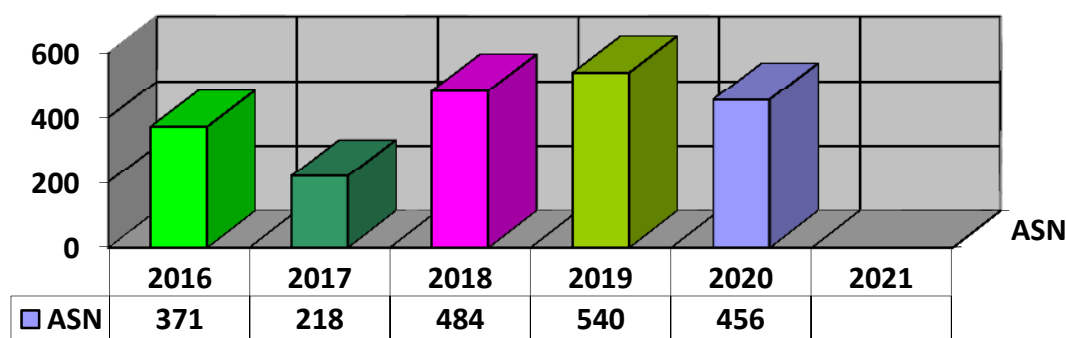
Sumber: Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, 2020, data primer

Adapun rincian sebagai berikut:

1. Pengumpulan data penetapan nama-nama wajib lapor LHKPN di provinsi Kalimantan Tengah yang mengelola dana diatas 1 milyar keatas sudah terkumpul datanya dan diserahkan ke Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengelola LHKPN sebanyak 525 orang wajib lapor LHKPN;
2. Wajib lapor LHKPN yang sudah melaporkan berjumlah 484 orang;
3. Wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan berjumlah 41 orang;
4. Jumlah presentase tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 92,19% dengan yang belum melaporkan sebesar 7,81%;

Sebagai gambaran perbandingan wajib lapor LHKPN setiap tahunnya disajikan pada gambar berikut :

Gambar 3. 7
Perbandingan Wajib Lapor LHKPN



Sumber: Subbagian Reformasi Birokrasi, 2020, data diolah

SASARAN STRATEGIS 5 **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan** **Tumbuhnya Inovasi Pelayanan**

Melalui sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur, yaitu:

1. Jumlah Inovasi di Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai bentuk pelayanan yang mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik maka diselenggarakanlah kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diatur kedalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Melalui gerakan *One Agency One Innovation*, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) secara nasional. Upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Indonesia, termasuk pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah yang mempunyai inovasi pelayanan publik terbaik.

Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020 yaitu “***Transfer Pengetahuan untuk Percepatan Inovasi Pelayanan Publik dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indonesia Maju***”.

Berikut rincian inovasi se-Kalimantan Tengah yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 3. 14
Inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	Judul	Status	Instansi
1.	SIMPUN (Sinde Muhun Pelayanan Uras Dinun)	Evaluator	Disdukcapil Kab. Kapuas
2.	PATUH SELAM	Evaluator	Kel. Selat Dalam Kab. Kapuas
3.	Gema Super (Gerakan Masyarakat Suka Perpustakaan)	Evaluator	Disperpusip Kab. Sukamara
4.	Program Keluarga Berencana Peduli Pekerja Perempuan (PRO KB PEKA PUAN)	Evaluator	Kotawaringin Timur
5.	PINTAR (PERPANJANGAN IZIN TANPA SYARAT)	Admin Lokal	Dpmptsp Kab. Seruyan

Sumber: Sub Bagian Pelayanan Publik, 2020, data primer

Analisis inovasi di Kalimantan Tengah yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Provinsi Kalimantan Tengah : 0 Inovasi
2. Kabupaten Kapuas : 2 Inovasi
3. Kabupaten Sukamara : 1 Inovasi
4. Kabupaten Kotawaringin Timur : 1 Inovasi
5. Kabupaten Seruyan : 1 Inovasi (tidak tersubmit)

Pengajuan proposal inovasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) berlangsung sejak tanggal 4 Maret hingga 10 Mei 2020. Jumlah proposal inovasi yang terdaftar di Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) berjumlah 3.059 inovasi. Sebanyak 2.250 proposal inovasi yang terdiri dari 2.126 proposal Kelompok Umum, 33 proposal Kelompok Replikasi, dan 91 proposal Kelompok Khusus, berhasil lolos seleksi administrasi.

Seluruh proposal tersebut kemudian dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi dan dihasilkan 229 nominasi proposal Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus KIPP 2020. Tim Evaluasi melakukan penilaian proposal dan menyerahkan hasil penilaian kepada Tim Panel Independen. Pada rapat pleno tanggal 17



Juni 2020, Tim Panel Independen yang dipimpin Prof. J.B Kristiadi memilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus KIPP 2020.

Tabel 3. 15
Jumlah Inovasi di Provinsi Kalimantan Tengah

Target/Capaian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target	90	45	45	10	10
Capaian	32	20	8	8	5

Sumber: Sub Bagian Pelayanan Publik, 2020, data primer

Status proposal inovasi yang lolos ke tahap desk evaluation akan berubah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi status evaluator. Menurunnya antusiasme Perangkat Daerah dalam mengajukan inovasi disebabkan masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan proposal ataupun belum bisa mengajukan inovasi yang mana harus lebih dari 1 (satu) tahun pelaksanaannya.

2. Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sebagai tindak lanjut dari asas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa “Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Maka Penyelenggara Negara diwajibkan menyusun Standar Operasional Prosedur yang telah diatur di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Adapun saran untuk penyusunan SOP adalah:

- Setiap SOP harus unik, tidak sama prosesnya dengan SOP yang lain;
- Aktivitas pertama dimulai dari paling kiri dengan simbol kapsul;
- Perumusan kegiatan seharusnya dimulai dengan menggunakan kata kerja;
- Urutan kolom pelaksana merupakan urutan proses bukan jenjang jabatan;
- Kolom pelaksana yang tidak mempunyai peran dalam flowchart tidak perlu dibuat;
- Simbol kegiatan yang bersifat pengambilan keputusan adalah belah ketupat;



- g. Pembuatan bagan anak panah dihindari saling tumpang tindih.

Tabel 3. 16
Jumlah Dokumen SOP

Target/Capaian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target	110	45	45	46	46
Capaian	43	38	43	46	46

Sumber: Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, 2020, data primer

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Hal ini yang menjadi perhatian utama atas hasil survei tersebut adalah harus ada saran perbaikan dari pemberi layanan yang harus disurvei terhadap peningkatan kualitas layanan. Demi kelancaran perhitungan Capaian Sasaran Pembangunan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat Kalimantan Tengah maka dipergunakan sistem perhitungan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 17
Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Interval IKM	Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik
2.	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3.	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
4.	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB, No. KEP/25/M.PAN/2/2004

Metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung IKM Tengah adalah:

$$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Total Interval Konversi PD}}{\text{PD yang mengadakan survei}}$$

Penyelenggara pelayanan publik yang telah melaksanakan survei harus melakukan penyusunan laporan survei. Laporan hasil survei dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara berkesinambungan. Laporan survei kepuasan masyarakat yang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 3. 18
Daftar Nilai IKM PD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,03	B	Baik
2.	Badan Pendapatan Daerah	85	B	Baik
Rata-rata IKM		83,02	B	Baik

Sumber: Subbagian Pelayanan Publik, 2020, data primer diolah

Tabel 3. 19
Perbandingan Nilai IKM Pertahun

Target/Capaian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target	77,23	80	82	84	86
Capaian	-	74,33	76,93	80,06	83,02

Sumber: Subbagian Pelayanan Publik, 2020, data primer diolah

Melihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah baik. Adapun permasalahan umum yang sering ditemui saat pelaksanaan survei sebagai berikut:

- Petugas kurang independen dan belum berpengalaman;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta di dalam mengisi survei;
- Metode survei masih sederhana sehingga hasil yang diperoleh masih belum menggambarkan keseluruhan permasalahan;
- Belum adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- Pengaturan waktu survei yang terburu-buru sehingga tidak efisien.



SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatnya Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019. Maka telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari tahun 2015 dengan rincian hasil evaluasi ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3. 20
Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			2018	2019
			2015	2016	2017		
I	Komponen Pengungkit						
1.	Manajemen Perubahan	5,00	1,31	2,50	1,48	1,46	1,27
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1.46	2,71	2,90	2,50	2,50
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,99	3,16	3,18	3,32	3,32
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,41	3,34	2,34	2,26	2,20
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,37	6,04	10,80	10,70	10,51
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	3,88	2,65	2,63	2,68
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	2,66	4,11	3,50	4,21	4,21
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,03	2,99	2,99	2,78	2,79
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	21,88	28,73	29,84	29,85	29,48
II	Komponen Hasil						
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00		8,50	8,59	8,59	8,80
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00		4,44	4,80	3,61	3,69
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00		4,81	5,49	5,90	6,14
4.	Opini BPK	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00		7,33	7,98	8,33	8,48
Total Komponen Hasil (B)		40,00		28,08	29,86	29,43	30,11
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,0		56,80	59,70	59,28	59,59

Sumber: Kemenpan RB, 2019, data primer

Hal yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar rekomendasi yang diberikan tahun lalu belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga belum terlihat perkembangan yang signifikan dalam mewujudkan perubahan tata kelola dalam penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan masih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk. Belum disusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menggambarkan dan memuat sasaran perubahan yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pokja belum terkait satu sama lain dan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja juga belum sepenuhnya merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis;



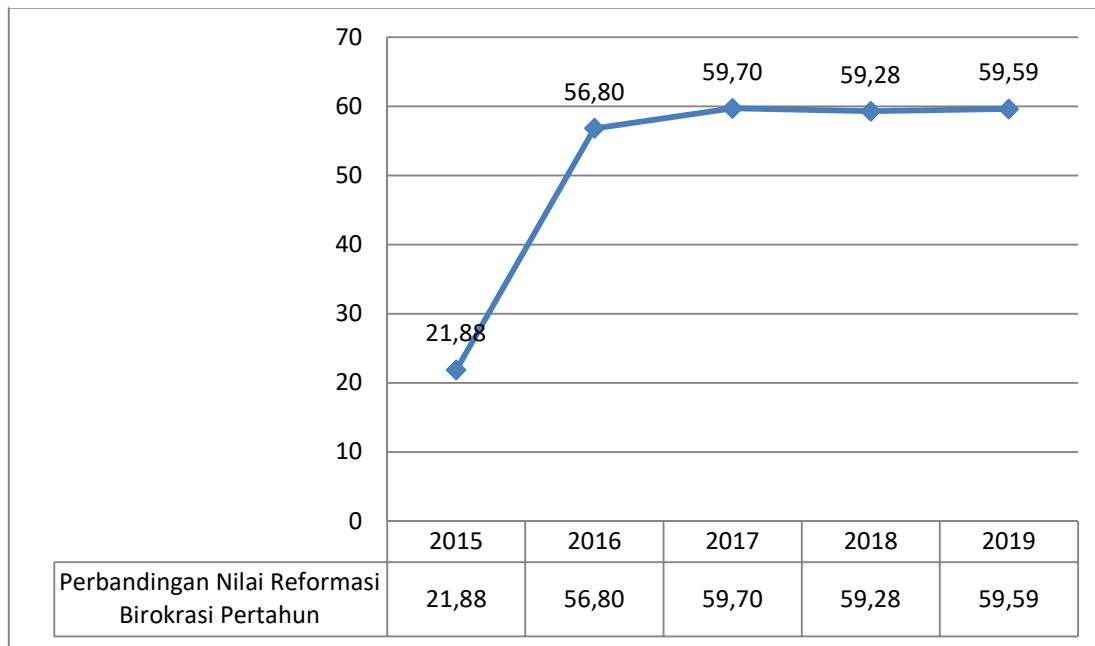
3. Upaya internalisasi reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan belum terlihat komitmen pimpinan sebagai *role model* bagi setiap pegawainya dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi. Selain itu agen perubahan yang ada juga belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam menggerakkan organisasi untuk melakukan perubahan budaya kerja sehingga belum terlihat perubahan nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Pemantauan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilakukan secara efektif secara berkala, dengan membandingkan target rencana aksi dengan hasil perubahan yang dicapai, mengidentifikasi permasalahan, dan kendala dalam pelaksanaannya serta menyusun tindak lanjut perbaikan;
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki peta proses bisnis yang menggambarkan sinergi antar Perangkat Daerah (PD) maupun internal PD yang berdasarkan keterkaitan proses mewujudkan kinerja;
6. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala, untuk mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik;
7. Struktur organisasi yang dibangun belum sesuai dengan kinerja organisasi yang akan diwujudkan sesuai mandat dan tujuan organisasi serta belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi;
8. Belum mengembangkan indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi untuk dimanfaatkan dalam pengukuran capaian kinerja pegawai melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan sebagai pertimbangan pemberian *reward* dan *punishment*;
9. Pengendalian internal telah dilakukan namun belum seluruh unit kerja menerapkan secara efektif untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalisir potensi kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaannya;
10. Implementasi atas sistem pengawasan seperti penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) dan Benturan Kepentingan belum efektif pada seluruh PD;
11. Belum optimalnya implementasi pelayanan publik khususnya di Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan langsung kepada masyarakat dalam hal pemberian reward



dan punishment terhadap pemberi layanan dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat;

12. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat mewujudkan unit kerja yang memiliki Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Gambar 3. 8
Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun



Sumber: Subbagian Reformasi Birokrasi, 2020, data primer diolah

Dalam rangka meningkatkan kualitas serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan reuiu atas *road map* reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilan dan targetnya. Dalam penyusunan dan penyempurnaan *road map* reformasi birokrasi nasional, juga memperhatikan hasil dari reuiu terhadap kekurangan *road map* yang disusun pada periode sebelumnya dan mengintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD);

2. Pada level instansi dan perangkat daerah agar menyusun rencana aksi guna mengawal penerapan road map reformasi birokrasi setiap tahunnya untuk memastikan ketercapaian sasaran yang sudah ditetapkan. Selain itu, diharapkan instansi untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian hasil pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun.
3. Secara berjenjang menginternalisasikan rencana aksi reformasi birokrasi dan hasil perubahan yang akan diwujudkan di Provinsi Kalimantan Tengah kepada seluruh pegawai di seluruh perangkat daerah agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan tatakelola di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Meningkatkan peran agen perubahan di setiap perangkat daerah selain bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu mendorong perubahan sesuai kebutuhan di unit kerjanya dan membangun social control diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas;
5. Menerapkan performance based organization dengan melakukan reviu terhadap struktur organisasi yang ada dengan mengacu pada kinerja yang akan dicapai, penyederhanaan birokrasi dan memperhatikan proses mewujudkan kinerja organisasi secara berjenjang;
6. Menetapkan peta proses bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antar PD maupun internal PD. Peta proses bisnis tersebut dijabarkan ke dalam SOP sebagai revisi atas SOP yang sudah ada.
7. Melakukan perbaikan kinerja dengan menyempurnakan indikator kinerja secara berjenjang dari level instansi sampai ke individu yang berorientasi hasil dan terukur, dengan memperhatikan keterkaitan proses mewujudkan kinerja organisasi. Hal tersebut untuk memastikan setiap level organisasi sampai individu memiliki kontribusi kinerja yang jelas sesuai levelnya dalam pencapaian sasaran organisasi;
8. Menyempurnakan mekanisme penilaian kinerja individu dengan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, dan pengembangan kompetensi setiap pegawai;
9. Mengefektifkan implementasi sistem pengawasan seperti penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, WBS dan benturan kepentingan;



10. Melakukan pembangunan zona integritas secara masif sebagai salah satu upaya dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan beberapa sistem pelayanan yang dimungkinkan, menyempurnakan SOP pelayanan, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemberian reward dan punishment kepada pemberi layanan serta melakukan evaluasi layanan dengan memperhatikan hasil survei kepuasan;
12. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar mampu mengevaluasi hasil perubahan yang dicapai unit kerja, tidak semata-mata hanya menilai kelengkapan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi;
13. Dalam rangka penguatan integritas aparatur, inspektorat agar mendorong seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
14. Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

Adapun akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan uraian yang digunakan:


1. Indikator Kinerja Utama yang digunakan merupakan Indikator Kinerja Utama pada level *outcome*, dimana Indikator dipilih menyesuaikan antara Visi dan Misi Gubernur di RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Biro Organisasi Tahun 2016-2020. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pada tahun tersebut berjalan dengan baik dan lancar.
2. Beberapa Indikator Kinerja Utama realisasinya mempergunakan data dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh Kemenpan RB, KPK dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang biasanya dilakukan setahun sekali. Sehingga hasil data bersifat transparan, akuntabel dan terverifikasi.



C. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun tingkat efisiensi pada Biro Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 21
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Program	Perubahan Anggaran	Realisasi		Efisiensi Anggaran
1.	Meningkatnya Nilai (Kategori) Penyusunan Laporan Kinerja LAPKIN yang baik dan benar	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.711.200	32.711.200	100	0
2.	Tersusunnya Perda dan Pergub UPTD Provinsi, Kab/Kota	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	166.060.800	165.613.800	99,73	0
3.	Meningkatnya Akurasi dan Kualitas Analisis Jabatan SKPD Pemerintah Provinsi.					
4.	Meningkatnya hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah provinsi Kalimantan Tengah					
5.	Meningkatnya Transparansi Kepemilikan Harta Kekayaan ASN (Pejabat) Pemerintah Prov. Kalteng	Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN	101.473.800	99.975.200	98,52	1,48
6.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, dengan tumbuhnya inovasi pelayanan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	50.536.681	50.536.681	100	0
	Program Penunjang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	778.401.451,25	774.527.720	99,50	0,50
		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	20.000.000	20.000.000	100	0
BELANJA TIDAK LANGSUNG			0	0	0	0
BELANJA LANGSUNG			1.149.183.932	1.143.364.601	99,49	 0,51



Pagu Biro Organisasi Realisasi anggaran tahun 2020 adalah Rp 1.149.183.932,- dengan realisasi capaian Biro Organisasi sebesar Rp 1.143.364.601,- dengan persentase sebesar 99,49%. dengan efisiensi anggaran diperoleh nilai 0,51%.

Tabel 3. 22
Standar Efisiensi Anggaran

No	Prosentase Kinerja Pemerintah	Kinerja
1.	<60%	Sangat Efisien
2.	60%-80%	Efisien
3.	80%-90%	Cukup Efisien
4.	90%-100%	Kurang Efisien
5.	>100%	Tidak Efisien

Rumus perhitungan efisiensi anggaran :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \left[\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Awal}} \times 100\% \right]$$

$$\text{Rasio Efisiensi Anggaran Biro Organisasi} = \left[\frac{1.143.364.601}{2.259.308.075} \times 100\% \right] = 50,61\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis secara keseluruhan dapat dinilai bahwa anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah sudah sangat efisien. Rasionalisasi anggaran mencapai 49,14% dari pagu anggaran awal dengan penyerapan anggaran mencapai 99,49% sudah melebihi target yang diharapkan.

D. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Secara garis besar, Anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 adalah Rp. 2.259.308.075,- setelah perubahan anggaran yang berubah menjadi hanya Rp. 1.149.183.932,25,- (50,86%). Berkurang sebesar 1.110.124.142,75,- atau 49,14% dari anggaran pagu awal.



Tabel 3. 23
Rincian Program Biro Organisasi Tahun 2020

No.	Program	Kegiatan	Anggaran		Perubahan Anggaran	
1	Program Administrasi Perkantoran		Rp.	680.576.739	Rp.	778.401.451,25
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Rp.	10.000.000	Rp.	10.000.000
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp.	565.426.739	Rp.	564.061.739,25
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	10.150.000	Rp.	10.150.000
	4	Rakor dan Konsultasi Luar Daerah	Rp.	45.000.000	Rp.	21.545.800
	5	Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp.	50.000.000	Rp.	172.643.912
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp.	20.000.000	Rp.	20.000.000
	1	Forum Sekretaris Daerah	Rp.	20.000.000	Rp.	20.000.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian		Rp.	145.000.000	Rp.	32.711.200
	1	Asistensi Penyusunan LAKIP	Rp.	95.000.000	Rp.	30.576.200
	2	Pemanfaatan Sistem Informasi LKIP Berbasis Web (e-LKIP)	Rp.	50.000.000	Rp.	2.135.000
4	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Rp.	891.748.252	Rp.	166.060.800
	1	Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota Se Kalimantan Tengah	Rp.	55.608.050	Rp.	9.505.500
	2	Pembinaan dan Asistensi Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp.	45.000.000	Rp.	6.604.500
	3	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp.	78.000.000	Rp.	10.656.400
	4	Penyusunan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Rp.	60.000.000	Rp.	7.566.500
	5	Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	Rp.	62.000.000	Rp.	25.024.500
	6	Penyusunan Formasi Jabatan	Rp.	60.992.430	Rp.	23.475.100
	7	Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp.	54.301.636	Rp.	18.295.000
	8	Rapat Pra Rakor dan Rakor Regional Bidang Organisasi dan Kepegaw aian Se Kalimantan Tengah Sesuai Agenda Tiap Tahun	Rp.	45.000.000	Rp.	998.000
	9	Penataan UPTD Provinsi Kalimantan Tengah	Rp.	73.000.000	Rp.	9.596.300
	10	Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Rp.	50.000.000	Rp.	1.599.000
	11	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah	Rp.	217.846.136	Rp.	32.603.500
	12	Evaluasi Jabatan	Rp.	90.000.000	Rp.	20.136.500
5	Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN		Rp.	177.415.384	Rp.	101.473.800
	1	Pengelolaan Administrasi LHKPN	Rp.	35.000.000	Rp.	2.755.800
	2	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Rp.	25.000.000	Rp.	1.450.000
	3	Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan Biro	Rp.	80.000.000	Rp.	96.330.000
	4	Rapat Koordinasi Teknis Program dan Kegiatan Bidang Organisasi Se Kalimantan Tengah	Rp.	37.415.384	Rp.	938.000
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Rp.	344.567.700	Rp.	50.536.681
	1	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Rp.	75.000.000	Rp.	4.554.000
	2	Evaluasi Tata Naskah Dinas	Rp.	57.411.700	Rp.	19.473.200
	3	Asistensi Standar Pelayanan Publik (SPP)	Rp.	127.581.500	Rp.	19.019.481
	4	Asistensi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Rp.	84.574.500	Rp.	7.490.000
TOTAL			Rp.	2.259.308.075	Rp.	1.149.183.932



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran dari Renstra, maupun analisis kinerjanya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kategori “baik”. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memerlukan komitmen dan kerja keras semua komponen baik pimpinan, pejabat maupun pelaksana didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kinerja yang matang dan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

1. Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, hendaknya dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi. Langkah penyebarluasan dan implementasi secara nyata pelaksanaan berbagai kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
3. Perlu upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.
4. Perlunya koordinasi dan bantuan pada kondisi keterbatasan sumber daya, yang dalam hal ini keterbatasan sumber data informasi. Sehingga Laporan Kinerja kedepannya, lebih akuntabel, reliabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS RESKINOF, SH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,


FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P
NIP. 196912121996031003

Palangka Raya, Januari 2019

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,


AGUS RESKINOF, SH., M.Si
NIP. 196011031993031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : BIRO ORGANISASI

Tugas dan Fungsi:


Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana.

- penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi;
- penyusunan bahan perencanaan strategis bidang di bidang organisasi;
- penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pengembangan kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana;
- penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana;
- penyusunan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang pengembangan kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana;
- pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan LAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Baik Dan Akuntabel	Kategori Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Penilaian Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Menyusun Laporan Kinerja Yang Baik	Penilaian Dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Kategori Baik, Cukup)	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = AA > 90 - 100 (Sangat Memuaskan)	Penilaian Dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = A > 80 - 90 (Memuaskan)	Penilaian Dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = BB > 70 - 80 (Sangat Baik)	Penilaian Dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = B > 60 - 70 (Baik, Perlu Perbaikan)	Penilaian Dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = CC > 50 - 60 (Cukup)	Penilaian Dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = C > 30 - 50 (Kurang, Perlu Banyak Perbaikan)	Penilaian Dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = D > 0 - 30 (Sangat Kurang)	Penilaian Dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Meningkatnya penataan UPTD sesuai sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah UPTD yang sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah UPTD Yang Terealisasi Dibagi Target Jumlah UPTD Dikalikan Seratus	Biro Organisasi Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3.	Meningkatnya Akurasi dan Kualitas Analisis Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Jabatan di Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Dilakukan Analisis	Jumlah Jabatan Yang Dianalisis Dibagi Target Dikali Seratus	Biro Organisasi Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah Pegawai Yang Menempati Jabatan Yang Tersedia Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pegawai Yang Terealisasi Dibagi Target Dikali Seratus	Biro Organisasi Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4.	Meningkatnya Transparansi Kepemilikan Harta Kekayaan Pejabat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalteng	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan LHKPN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan LHKPN Dibagi Target Jumlah Aparatur Sipil Negara Dikalikan Seratus	Biro Organisasi Bagian Pengembangan Kinerja Aparatur Pemerintah
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Di Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	Inovasi Yang Terealisasi Dibagi Target Inovasi Dikali Seratus	Biro Organisasi Bagian Tatalaksana
		Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah Yang Tersedia Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen SOP Dibagi Target Dikali Seratus	Biro Organisasi Bagian Tatalaksana
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik	Jumlah Total Nilai Survei Yang Telah Dilaksanakan Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Survei Dikali Seratus	Biro Organisasi Bagian Tatalaksana
6.	Meningkatnya Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,


FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P
NIP. 196912121996031003

Palangka Raya, Januari 2019
Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,


AGUS RESKINOF, SH., M.Si
NIP. 196011031993031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS RESKINOF, SH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P
NIP. 196912121996031003

AGUS RESKINOF, SH., M.Si
NIP. 196011031993031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

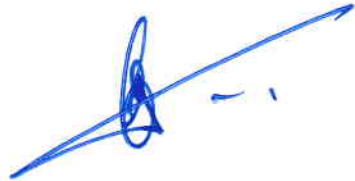
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan LAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Baik Dan Akuntabel	Kategori Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	75
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Menyusun Laporan Kinerja Yang Baik	Perangkat Daerah	38
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = AA > 90 -100 (Sangat Memuaskan)	Perangkat Daerah	-
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = A > 80 - 90 (Memuaskan)	Perangkat Daerah	-
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = BB > 70 - 80 (Sangat Baik)	Perangkat Daerah	3
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = B > 60 - 70 (Baik, Perlu Perbaikan)	Perangkat Daerah	19
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = CC > 50 - 60 (Cukup)	Perangkat Daerah	13
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = C > 30 - 50 (Kurang, Perlu Banyak Perbaikan)	Perangkat Daerah	3
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = D > 0 - 30 (Sangat Kurang)	Perangkat Daerah	-
2.	Meningkatnya penataan UPTD sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah UPTD yang sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	UPTD	90
3.	Meningkatnya Akurasi dan Kualitas Analisis Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Jabatan di Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Dilakukan Analisis	Jabatan	4.459
		Jumlah Pegawai Yang Menempati Jabatan Yang Tersedia Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Orang	10.343
4.	Meningkatnya Transparansi Kepemilikan Harta Kekayaan Pejabat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalteng	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan LHKPN	Orang	530
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Di Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	Inovasi	10
		Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah Yang Tersedia Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	46
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik	Indeks	86
6.	Meningkatnya Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	80

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 680.576.739	
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 20.000.000	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 145.000.000	
4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 891.748.252	
5. Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN	Rp. 177.415.384	
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 344.567.700	

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P
NIP. 196912121996031003

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,



AGUS RESKINOF, SH., M.Si
NIP. 196011031993031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS RESKINOF, SH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2020
KEPALA BIRO,

AGUS RESKINOF, SH., M.Si
NIP. 196011031993031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111

Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

A. Target Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan LAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Baik Dan Akuntabel	Kategori Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	75	-	-	-	75	
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Menyusun Laporan Kinerja Yang Baik	PD	38	-	38	-	-	
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = AA > 90 -100 (Sangat Memuaskan)	PD	-	-	-	-	-	
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = A > 80 - 90 (Memuaskan)	PD	-	-	-	-	-	
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = BB > 70 - 80 (Sangat Baik)	PD	3	-	3	-	-	
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = B > 60 - 70 (Baik, Perlu Perbaikan)	PD	19	-	19	-	-	
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = CC > 50 - 60 (Cukup)	PD	13	-	13	-	-	
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = C > 30 - 50 (Kurang, Perlu Banyak Perbaikan)	PD	3	-	3	-	-	
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = D > 0 - 30 (Sangat Kurang)	PD	-	-	-	-	-	
2.	Meningkatnya penataan UPTD sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah UPTD yang sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	UPTD	90	30	30	30	-	
3.	Meningkatnya Akurasi dan Kualitas Analisis Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Jabatan di Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Dilakukan Analisis	Jabatan	4.459	-	4.459	-	-	
		Jumlah Pegawai Yang Menempati Jabatan Yang Tersedia Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Orang	10.343	2.585	2.586	2.586	2.586	
4.	Meningkatnya Transparansi Kepemilikan Harta Kekayaan Pejabat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalteng	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan LHKPN	Orang	530	100	100	200	130	


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Di Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	Inovasi	10	-	10	-	-	
		Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah Yang Tersedia Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	46	-	-	46	-	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik	Indeks	86	-	-	-	86	
6.	Meningkatnya Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	80	-	80	-	-	

B. Target Realisasi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		680.576.739	145.365.348	208.813.022	199.282.022	127.116.347	
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatir		20.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		145.000.000	32.534.000	49.703.900	44.136.235	18.625.865	
	1.	Kegiatan Asistensi Penyusunan LAKIP	95.000.000	30.284.000	26.954.800	37.692.780	68.420	
	2.	Kegiatan Pemanfaatan Sistem Informasi LKIP Berbasis Web (e-LKIP)	50.000.000	2.250.000	22.749.100	6.443.455	18.557.445	
4.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		891.748.252	183.758.266	260.815.075	261.960.182	185.214.729	
	1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	78.000.000	15.600.000	23.400.000	23.400.000	15.600.000	
	2.	Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	62.000.000	12.400.000	18.600.000	18.600.000	12.400.000	
	3.	Penyusunan Formasi Jabatan	60.992.430	18.297.729	18.297.729	18.297.729	12.198.486	

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
	4.	Penataan UPTD Provinsi Kalimantan Tengah	73.000.000	14.600.000	21.900.000	21.900.000	14.600.000	
	5.	Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	50.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	
	6.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah	217.846.136	48.977.843	58.644.441	59.789.548	50.434.304	
5.	Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN		177.415.384	17.290.461	49.090.115	63.043.673	47.991.135	
	1.	Pengelolaan Administrasi LHKPN	35.000.000	0	15.359.400	14.444.600	5.196.000	
	2.	Penyusunan Perjanjian Kinerja	25.000.000	1.466.000	1.296.100	6.863.765	15.374.135	
6.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		344.567.700	68.913.540	103.370.310	103.370.310	68.913.540	
	1.	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	75.000.000	15.000.000	22.500.000	22.500.000	15.000.000	
	2.	Asistensi Standar Pelayanan Publik (SPP)	127.581.500	25.516.300	38.274.450	38.274.450	25.516.300	
	3.	Asistensi Standar Operasional Prosedur (SOP)	84.574.500	6.313.400	33.386.500	42.298.000	2.576.600	

Palangka Raya, Januari 2020
KEPALA BIRO,


AGUS RESKINOF, SH., M.Si
NIP. 196011031993031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan LAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Baik Dan Akuntabel	Kategori Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	80
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Menyusun Laporan Kinerja Yang Baik	Perangkat Daerah	38
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = AA > 90 - 100 (Sangat Memuaskan)	Perangkat Daerah	-
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = A > 80 - 90 (Memuaskan)	Perangkat Daerah	-
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = BB > 70 - 80 (Sangat Baik)	Perangkat Daerah	-
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = B > 60 - 70 (Baik, Perlu Perbaikan)	Perangkat Daerah	25
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = CC > 50 - 60 (Cukup)	Perangkat Daerah	12
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = C > 30 - 50 (Kurang, Perlu Banyak Perbaikan)	Perangkat Daerah	-
		Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Kategori) = D > 0 - 30 (Sangat Kurang)	Perangkat Daerah	-
2.	Meningkatnya penataan UPTD sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah UPTD yang sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	UPTD	90
3.	Meningkatnya Akurasi dan Kualitas Analisis Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Jabatan di Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang Dilakukan Analisis	Jabatan	2.718
		Jumlah Pegawai Yang Menempati Jabatan Yang Tersedia Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Orang	5046
4.	Meningkatnya Transparansi Kepemilikan Harta Kekayaan Pejabat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalteng	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan LHKPN	Orang	530
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Di Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	Inovasi	10
		Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah Yang Tersedia Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	46
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik	Indeks	88
6.	Meningkatnya Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	85

Palangka Raya, Januari 2020
KEPALA BIRO,


AGUS RESKINOF, SH., M.Si
NIP. 196011031993031003

Ringkasan Capaian Keuangan Berdasarkan Program di Biro Organisasi

No	Program	Anggaran 2016	Realisasi Tahun 2016		Anggaran 2017	Realisasi Tahun 2017		Anggaran 2018	Realisasi Tahun 2018		Anggaran 2019	Realisasi Tahun 2019		Anggaran 2020	Realisasi Tahun 2019	
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	178.931.700	171.376.500	95,77	854.918.222	797.928.370	93,33	265.000.000	259.382.900	97,88	270.000.000	227.671.534	84,32	145.000.000	37.711.200	26,01
2	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	955.127.562	924.403.800	96,78	1.079.424.681	1.054.057.695	97,65	1.072.900.000	998.640.633	93,08	1.247.414.720	1.091.847.100	87,53	891.748.252	165.613.800	18,57
3	Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN	773.203.100	742.602.350	96,04	587.764.650	561.725.731	95,57	711.700.000	690.022.820	96,95	493.931.500	458.776.550	92,88	177.415.384	99.975.200	56,35
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	528.448.854	501.573.050	94,91	358.076.663	347.010.300	96,91	836.000.000	805.097.524	96,30	580.143.500	455.873.322	78,58	344.567.700	50.536.681	14,67
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	660.835.784	657.496.000	99,49	595.335.784	571.745.250	96,04	660.400.000	636.397.892	96,37	705.588.280	697.441.804	98,85	680.576.739	774.527.720	113,80
6	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1.300.000	1.300.000	100	20.000.000	20.000.000	100	0	0	0	48.922.000	47.177.000	96,43	20.000.000	20.000.000	100
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LANGSUNG	3.097.847.000	2.998.751.700	96,80	3.495.520.000	3.352.467.346	95,91	3.546.000.000	3.389.541.769	95,59	3.346.000.000	2978.787.310	89,03	2.259.308.075	1.143.364.601	50,61

Sumber: Subbagian Tata Usaha, 2021, data primer diolah